

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM SYARIAH (KSPS)**

**Ida Ayu Setyaningsih
B12.2011.01963**

ABSTRACT

Determination SAK ETAP aims to provide facilities of prepared a report on its own financial and help in presenting a financial statement that relevant and reliable, so that the information contained in the financial statements quality. This study aims to assess KSPS Makmur Batang in applying GAAP financial statements based on ETAP.

This research is descriptive, used the RAT KSPS Makmur Batang years 2012-2013 as a data source. Data were analyzed using qualitative analysis approach to contents.

Results of the study was (1) the financial statements of KSPS Makmur Batang no accordance SAK ETAP, because (a) the presentation of: accounting policies according on Cooperatives Law to only Article 37 paragraph (1) and only present comparative at balance sheet; (B) measurements: the basis of calculation and the age of the assets are not in accordance with SAK ETAP; building for the years 2012-2013 are not depreciated; net income of report is not presented on the consolidated balance sheet; (C) does not present a cash flow statement; (D) did not present a statement of changes in equity; (E) the elements CALK: not present information about the basis of preparation of the financial statements and the accounting policies used; not disclose information required in SAK ETAP, but not presented in the financial statements; and did not provide additional information that is not presented in the financial statements but is relevant to understanding the financial statements; and (2) The financial statements KSPS Makmur Batang SAK ETAP not appropriate, because due to internal factors and external factors. Internal factors as management considers the financial statements which have been prepared already to meet the needs of the organization or in other words the knowledge of the management of the SAK ETAP less; while the external factor is the lack of supervision of the parties concerned on the financial statements of the cooperative.

Keywords: RAT, SAK ETAP, and net income

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi (Rudianto, 2008). Berkaitan dengan lembaga syariah maka pencatatan transaksi keuangan tersebut harus dilandasi oleh spirit Islam, yaitu mengacu pada Qs Al-Baqarah ayat 282. Dengan demikian,

pencatatan akuntansi yang diharmonisasikan dengan spirit Islam maka insya Allah akan terbebas dari dampak negatif atau efek samping transaksi keuangan (Fajarwati & Sambodo, 2010).

Bagi lembaga syariah, tujuan dari laporan keuangan adalah (1) sebagai dasar pengambilan investasi dan pembiayaan; (2) sebagai sarana untuk menilai prospek arus kas; (3) memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi; (4) memberikan informasi kepatuhan lembaga syariah terhadap prinsip syariah; (5) laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga syariah terhadap amanah dalam menggunakan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan (6) memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial (Fajarwati & Sambodo, 2010).

Tujuan laporan keuangan lembaga syariah tersebut sejalan dengan tujuan laporan keuangan secara umum yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2009), yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud meliputi manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Pihak eksternal meliputi kreditor dan pemerintah.

Melihat pentingnya laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan diharapkan memiliki kualitas tinggi yang tercermin dari dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat (IAI, 2009). Majalah Akuntan Indonesia (2009) menuliskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdiri atas tiga pilar yaitu SAK(Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum), SAK ETAP, dan SAKSyariah.Pada penelitian ini difokuskan pada SAK ETAP karena jenis usaha

yang paling banyak di Indonesia adalah usaha skala kecil dan menengah, dimana apabila menggunakan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dinilai lebih banyak menimbulkan kesulitan karena terlalu rumit. Oleh karena itu, penetapan SAK ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya (Martani dalam Ariantini, dkk., 2014).

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2009 oleh IAI. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (Chariri, 2012). Jenis usaha yang tergolong dalam entitas tanpa akuntabilitas publik banyak terdapat di Indonesia mulai dari usaha kecil dan menengah termasuk juga badan usaha koperasi. Pada penelitian ini difokuskan pada koperasi, karena koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional, seperti pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian, dan menciptakan pasarbaru.

Koperasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Makmur Batang. Sebagai koperasi syariah, kegiatan usaha KSPS Makmur Batang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola bagi hasil (syariah). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.UKM/XII/2007 Pasal 1 ayat (3) bahwa kegiatan KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Penelitian ini memfokuskan pada KJKS dengan beberapa pertimbangan yang diambil dari artikel “Pembiayaan Syariah Jadi Perhatian Pemerintah” di Media

Keuangan yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan RI (2014) sebagai berikut: (1) Keluarnya fatwa bunga haram dari MUI yang di release tanggal 16 Desember 2003, (2) Meningkatnya kesadaran umat Islam untuk melakukan praktek berekonomi secara syariah, yang diindikasikan dengan pesatnya pertumbuhan Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya, (3) Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga memberi peluang pasar yang potensial untuk produk-produk berbasis syariah, (4) tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik sehingga perkembangan ilmu ekonomi syariah juga semakin baik, (5) Kondisi ekonomi global yang dilanda krisis, menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem alternatif penyelesaiannya, (6) Institusi bisnis syariah yang telah terbukti mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis dan menerapkan prinsip adil. Selain alasan tersebut, pemilihan KJKS juga didasari oleh pendapat Giu (2014) bahwa KJKS memiliki banyak keunggulan dibandingkan oleh lembaga keuangan informal seperti rentenir, yaitu siap memberikan pinjaman modal tanpa agunan, dengan prosedur administrasi yang mudah, rendah biaya transaksi, dan yang tak kalah penting bebas bunga. Hal tersebut tentunya akan menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada KJKS.

Penelitian ini dilaksanakan di KSPS Makmur Batang, yang kantor pusatnya berada di Jl. Raya Banyuputih No. 314 Batang. Koperasi ini berdiri pada tahun 2001 dan hingga akhir tahun 2013 memiliki anggota sebanyak 979 orang.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara kepada bagian keuangan KSPS Makmur Batang diketahui bahwa koperasi ini telah mendapatkan sosialisasi penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Dari sosialisasi tersebut koperasi menyusun laporan keuangannya untuk periode 2013 menyesuaikan dengan SAK ETAP, namun penerapannya belum sepenuhnya dilakukan.

Laporan keuangan yang dihasilkan KSPS Makmur Batang tahun 2013 hanya berupa laporan neraca dan sisa hasil usaha, sedangkan menurut SAK ETAP harus ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan neraca yang dibuat

KSPS Makmur Batang aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sudah dibuat sesuai dengan SAK ETAP, yaitu terpisah. Laporan laba rugi yang dimaksud dalam SAK ETAP oleh KSPS Makmur Batang dilaporkan sebagai laporan sisa hasil usaha, dan penyajiannya sudah sesuai SAK ETAP yaitu meliputi pendapatan operasional (pendapatan pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya), beban operasional (beban umum dan administasi, serta beban operasional lainnya), SHU sebelum pajak, beban pajak, dan SHU setelah pajak. Catatan atas laporan keuangan yang disajikan oleh KSPS Makmur Batang hanya mengenai informasi untuk menjelaskan setiap transaksi yang ada di neraca, perhitungan analisa tingkat kesehatan (rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio profitabilitas, dan penjelasan perhitungan hasil usaha. Menurut SAK ETAP, catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. Adanya ketidaksesuaian penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KSPS Makmur Batang dapat menyebabkan turunnya kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat menurunkan pula tingkat kepercayaan dari pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KSPS Makmur Batang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan RAT KSPS Makmur Batang tahun 2012-2013 sebagai sumber data. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan isi.

HASIL

Laporan Keuangan KSPS Makmur Batang

Tabel 1
Perbedaan Laporan Keuangan KSPS Makmur Batang Berdasarkan SAK ETAP

KETERANGAN	SAK ETAP	KSPS Makmur Batang	KESESUAIAN
PENYAJIAN			
	Penyajian wajar	telah berupaya menyajikan laporan keuangan secara wajar, jujur berdasarkan transaksi, dan diukur menurut kriteria pengakuan yang sudah ditetapkan	√
	Kepatuhan terhadap SAK ETAP	Belum menerapkan SAK ETAP	X
	Kelangsungan usaha	Menyajikan analisis tingkat kesehatan (likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan profitabilitas)	√
	Frekuensi pelaporan	Rutin mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang terintegral dalam laporan Rapat Anggota Tahunan	√
	Penyajian yang konsisten	Pos-pos yang disajikan oleh KSPS Makmur Batang tahun 2012-2013 konsisten	√
	Informasi komparatif	Hanya menyajikan secara komparatif untuk laporan neraca	X
	Materialitas dan agregasi	Telah memisahkan materialitas dan agregasi	√
KEBIJAKAN AKUNTANSI			
	Pasal 37 ayat (1) huruf c: minimal menyajikan neraca, perhitungan sisa hasil usaha, dan penjelasan atas dokumen tersebut	Laporan keuangan hanya menyajikan neraca, perhitungan sisa hasil usaha, dan penjelasan atas dokumen tersebut	√
	Pasal 37 ayat (2): disusun berdasarkan SAK yang berlaku, yaitu SAK ETAP	Belum menerapkan SAK ETAP	X
PENGUKURAN			
Kas atau setara kas	<ul style="list-style-type: none">• Berbasis akrual• Biaya historis• Nilai wajar	<ul style="list-style-type: none">• Berbasis akrual• Biaya historis• Nilai wajar	√
Uang muka	<ul style="list-style-type: none">• Berbasis akrual• Biaya historis	<ul style="list-style-type: none">• Berbasis akrual• Biaya historis	√

	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai wajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai wajar 	
Aktiva tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar • Metode penyusutan: garis lurus, saldo menurun, jumlah unit produksi • Dasar perhitungan: per setahun dan dihitung mulai dari tanggal perolehan • Umur ekonomis: (1) gedung & kios 20 tahun-5%; (2) kendaraan 10 tahun-10%; dan (3) peralatan kantor 5 tahun-20% • Gedung disusutkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar • Metode penyusutan: garis lurus • Dasar perhitungan: per setahun dan tidak dihitung mulai dari tanggal perolehan • Umur ekonomis: (1) gedung & kios 30 tahun-5%; (2) kendaraan 15 tahun-10%; dan (3) peralatan kantor 10 tahun-20% • Gedung tahun 2012-2013 tidak disusutkan 	X
Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar 	√
Biaya pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar 	√
Pajak penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pajak Penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pajak Penghasilan (perlakuan khusus pajak koperasi yaitu 10% SHU berjalan) 	√
Imbalan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar 	√
Pembagian SHU	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pengkoperasian, pembagian SHU menurut AD dan ART 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Pengkoperasian, pembagian SHU menurut AD dan ART • Pembagian SHU tidak disajikan dalam laporan keuangan 	X
UNSUR-UNSUR LAPORAN NERACA KEUANGAN			
	Kas dan setara kas	Kas, Bank, Pembiayaan yang diberikan	√
	Piutang usaha dan piutang lainnya	Biaya dibayar dimuka	√
	Persediaan	Tidak ada persediaan	√
	Properti investasi	Simpanan penyertaan koperasi sekunder	√
	Aset tetap	Aktiva tetap:	√

		Tanah, gedung, kios, kendaraan, peralatan kerja, akumulasi penyusutan	
	Aset tidak berwujud	Tidak disebutkan sebagai aset tidak berwujud dan dijadikan satu dalam aktiva tetap dengan nama aktiva lain-lain	√
	Utang usaha dan utang lainnya	hutang bank dan dimasukkan dalam kewajiban jangka panjang	√
	Aset dan kewajiban pajak	Dibayar dengan cara mengansur setiap bulan	√
	Kewajiban diestimasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. • Terdapat perhitungan SHU namun tidak dilaporkan 	X
	Ekuitas	Permodalan meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan penyertaan, hibah/donasi, dana cadangan umum, dan SHU berjalan	√
UNSUR-UNSUR PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA			
	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan operasional (pendapatan pembiayaan yang terdiri dari bagi hasil pembiayaan, bagi hasil jasa bank, dan pendapatan administrasi jasa bank) • Pendapatan operasional lainnya 	√
	Beban keuangan	Beban operasional yang terdiri dari beban umum dan administrasi, serta beban operasional lainnya	√
	Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas	SHU sebelum pajak	√
	Beban pajak	Beban pajak	√
	laba atau rugi neto	SHU setelah pajak	√
UNSUR-UNSUR LAPORAN ARUS KAS			
UNSUR-UNSUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
UNSUR-UNSUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
	Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak 	X
	Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak 	
	Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak 	

		<ul style="list-style-type: none">• Penjelasan dari pos-pos yang ada di neraca keuangan dan perhitungan SHU.• Penjelasan tersebut hanya menekankan pada rincian nilai transaksi	
--	--	--	--

Penerapan SAK ETAP terhadap Laporan Keuangan KSPS Makmur Batang

Tabel 2

Perbandingan Laporan Neraca Keuangan KSPS Makmur Batang Sebelum dan Sesudah Penerapan SAK ETAP

No.	Uraian	SEBELUM ETAP (2013)	SESUDAH ETAP (2013)	SEBELUM ETAP (2012)	SESUDAH ETAP (2012)
I	AKTIVA				
1	Kas	38,937,520	38,937,520	87,025,038	87,025,038
2	Bank	313,126,081	313,126,081	550,874,857	550,874,857
3	Pembiayaan	3,935,884,299	3,935,884,299	3,876,000,799	3,876,000,799
4	Biaya dibayar dimuka	93,719,153	93,719,153	48,766,000	48,766,000
5	Simpanan penyertaan ke koperasi sekunder	20,345,000	20,345,000	20,345,000	20,345,000
	Aktiva Tetap				
6	Tanah	168,100,000	168,100,000	168,100,000	168,100,000
7	Gedung	297,229,000	297,229,000	297,229,000	297,229,000
8	Kios	16,505,000	16,505,000	16,505,000	16,505,000
9	Kendaraan	40,383,000	40,383,000	40,383,000	40,383,000
10	Peralatan kantor	128,742,527	128,742,527	128,742,527	128,742,527
11	Akumulasi penyusutan	(94,158,835)	(162,895,963)	(70,066,342)	(128,052,646)
12	Aktiva lain-lain	500,000	500,000	500,000	500,000
	Jumlah	4,959,312,745	4,890,575,617	5,164,404,879	5,106,418,575
II	Kewajiban jangka pendek				
13	Simpanan sirela	1,275,195,706	1,275,195,706	900,298,458	900,298,458
14	Simpanan berjangka	1,463,069,581	1,463,069,581	1,314,000,000	1,314,000,000
15	Dana cadangan risiko pembiayaan	25,202,219	25,202,219	24,191,984	24,191,984
16	Jumlah dana PHU	-	67,164,416	-	26,312,176
	Kewajiban jangka panjang				
17	Hutang bank & pihak lain	1,551,565,344	1,551,565,344	2,436,855,611	2,436,855,611
	Permodalan				
18	Simpanan pokok	48,950,000	48,950,000	48,450,000	48,450,000

19	Simpanan wajib	64,489,000	64,489,000	38,024,000	38,024,000
20	Simpanan penyertaan	365,533,794	365,533,794	291,889,090	291,889,090
21	Hibab/donasi	56,762,777	56,762,777	56,762,777	56,762,777
22	Dana cadangan umum	16,166,176	14,246,997	8,032,568	5,581,371
23	SHU berjalan	92,378,148	81,411,413	45,900,391	31,893,547
	Jumlah	4,959,312,745	5,013,591,247	5,164,404,879	5,174,259,014

Sumber: Data sekunder yang diolah (2015)

Tabel 3
Perbandingan Laba Rugi KSPS Makmur Batang Sebelum dan Sesudah Penerapan SAK ETAP

		SEBELUM ETAP (2013)		SESUDAH ETAP (2013)		SEBELUM ETAP (2012)		SESUDAH ETAP (2012)	
I	Pendapatan Operasional								
1	Pendapatan pembiayaan								
	a. Bagi Hasil pembiayaan	982,454,059		982,454,059		874,991,806		874,991,806	
	b. Bagi Hasil Jasa Bank	2,378,535		2,378,535		10,378,535		10,378,535	
	c. Pendapatan administrasi	79,833,935		79,833,935		110,427,035		110,427,035	
			1,064,666,529		1,064,666,529		995,797,376		995,797,376
2	Pendapatan Operasional lainnya		2,316,000		2,316,000		3,032,500		3,032,500
	Jumlah pendapatan		1,066,982,529		1,066,982,529		998,829,876		998,829,876
II	Beban operasional								
3	Beban umum dan administrasi	(914,767,237)		(920,824,891)		(903,037,584)		(918,600,744)	
4	Beban operasional lainnya	(49,572,905)		(44,791,858)		(44,791,858)		(44,791,858)	
	Jumlah beban operasional		(964,340,142)		(965,616,749)		(947,829,442)		(963,392,602)
	SHU sebelum pajak		102,642,387		101,365,780		51,000,434		35,437,274
	Beban pajak		(10,264,239)		10,136,578		(5,100,043)		(3,543,727)
	SHU setelah pajak		92,378,148		91,229,202		45,900,391		31,893,547

Tabel 4
Laporan Arus Kas KSPS Makmur Batang Menurut SAK ETAP
Periode 31 Desember 2013
(dalam Rupiah)

	2013		2012	
PENDAPATAN OPERASIONAL				
a. Bagi Hasil pembiayaan	982,454,059		874,991,806	
b. Bagi Hasil Jasa Bank	2,378,535		10,378,535	
c. Pendapatan administrasi	79,833,935		110,427,035	
		1,064,666,529		
Pendapatan Operasional lainnya		2,316,000	3,032,500	
Jumlah pendapatan operasional		1,066,982,529		998,829,876
BEBAN OPERASIONAL				
Beban umum dan administrasi	920,824,891		918,600,744	
Beban operasional lainnya	44,791,858		44,791,858	
Jumlah beban operasional		(920,824,891)		(963,392,602)
Penambahan kas akibat operasi		101,365,780		35,437,274
PENDAPATAN INVESTASI				
Akumulasi penyusutan		162,895,963		128,052,646
BEBAN INVESTASI				
Beban akumulasi penyusutan		(36,277,755)		(34,053,608)
Penambahan kas akibat investasi		126,618,208		93,999,038
PENDAPATAN KEUANGAN				
Simpanan Sirela	1,275,195,706		900,298,458	
Simpanan Berjangka	1,463,069,581		1,314,000,000	
Dana Cadangan Risiko Pembiayaan	25,202,219		24,191,984	
Dana-dana SHU	67,164,416		26,312,176	

Hutang Bank & pihak lain	1,551,565,344		2,436,855,611	
Simpanan pokok	48,950,000		48,450,000	
Simpanan wajib	64,489,000		38,024,000	
Simpanan penyertaan	365,533,794		291,889,090	
Hibah/donasi	56,762,777		56,762,777	
Dana cadangan umum	14,246,997		5,581,371	
SHU berjalan	81,411,413		31,893,547	
Jumlah pendapatan keuangan		5,013,591,247		5,174,259,014
PENGELUARAN				
Pembagian SHU tahun sebelumnya		(26,312,176)		(26,343,516)
Penambahan kas dari keuangan		4,987,279,071		5,147,915,498

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 5
Laporan Ekuitas KSPS Makmur Batang Menurut SAK ETAP
Periode 31 Desember 2013
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2013	2012
I	MODAL AWAL	5,013,591,247	4,618,832,099
II	SHU tahun berjalan	91,229,202	31,893,547
	Simpanan pokok	48,950,000	48,450,000
	Simpanan wajib	64,489,000	38,024,000
	Simpanan penyertaan	365,533,794	291,889,090
	Hibah/donasi	56,762,777	56,762,777
	Dana cadangan umum	14,246,997	5,581,371
III	BERTAMBAH	641,211,770	472,600,785
IV	MODAL AKHIR	5,654,803,017	5,091,432,884

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

PENUTUP

Kesimpulan

1. Laporan keuangan KSPS Makmur Batang belum sesuai SAK ETAP, karena:
 - a. Penyajian: kebijakan akuntansi hanya mengacu UU Perkoperasian Pasal 37 ayat (1) dan hanya menyajikan secara komparatif untuk laporan neraca.
 - b. Pengukuran: (1) dasar perhitungan dan umur ekonomis aktiva tetap tidak sesuai SAK ETAP, serta gedung untuk tahun 2012-2013 tidak disusutkan; dan (2) pembagian SHU tidak disajikan pada laporan neraca keuangan.
 - c. Tidak menyajikan laporan arus kas
 - d. Tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas
 - e. Unsur-unsur CALK: tidak menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan; tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP, tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan tidak memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan namun relevan untuk memahami laporan keuangan.
2. Laporan keuangan KSPS Makmur Batang belum sesuai SAK ETAP, karena disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal karena pihak manajemen beranggapan laporan keuangan yang selama ini disusun sudah dapat memenuhi kebutuhan organisasi atau dengan kata lain pengetahuan pihak manajemen mengenai SAK ETAP kurang; sedangkan dari faktor eksternal adalah kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan koperasi

Saran

1. Bagi KSPS Makmur Batang diharapkan segera menerapkannya SAK ETAP, khususnya:
 - a. Melengkapi laporan keuangan yang sudah ada dengan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, sehingga laporan keuangan yang disajikan lebih lengkap dan andal.
 - b. Menyajikan dasar kebijakan akuntansi supaya tidak terjadi salah tafsir.

- c. Umur ekonomis dari aktiva tetap disesuaikan dengan SAK ETAP supaya tidak terjadi salah tafsir.
2. Bagi *stakeholders* diharapkan juga ikut serta dalam mendukung dan mengawasi penerapan SAK ETAP. Selain itu, perlu adanya suatu badan pengawas yang khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan SAK ETAP, sehingga ke depannya seluruh koperasi yang ada di Indonesia dapat menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. Peluncuran Standar Akuntansi syariah dan Standar Akuntansi ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). *Majalah Akuntansi Indonesia*, Malang, 17-18 Juli
- Andriani, L., Atmadja, A.T., & Sinarwati, N.K. 2014. Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada UMKM (Sebuah studi intrepetatif pada Peggy Salon). *Jurnal Pendidikan & Pengajaran (JPP)*, Vol. 2 (1): 1-12
- Ariantini, N.L.G., Zukhri, A., & Meitriana, M.A. 2014. Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri. *Jurnal Pendidikan & Pengajaran (JPP)*. Vol. 4 (1): 1-9
- Ash-Shadr, S.M. 2002. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chariri, A. 2012. *Paduan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik: Ilustrasi Laporan Keuangan PT ETAP Indonesia*. Jakarta: IAPI
- Data Jumlah Koperasi di Indonesia. http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=83 di akses tanggal 26 Oktober 2014.
- Fajarwati, D & Sambodo, S.D. 2010. Pengkajian tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah. *JRAK*, Vol. 2: 15-31.
- Giu, A.R. 2014. Pentingnya Pengenalan tentang Koperasi Syari'ah Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI. *Jurnal Ilmiah*, <http://www.bdkmanado.kemenag.go.id> di akses tanggal 26 Oktober 2014

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. “*Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*”. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Ikram, S. 2014. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 04/Per/M.KUMK/VII/2012. *Seminar IAI Wilayah Jawa Barat*.
- Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 91/Per/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi
- KSPS Makmur. “*Materi Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2013*”.
- Ma’wa, K.W. 2013. Analisis Perbandingan antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>. download 8 November 2014
- Narsa, I.M., Widowo, A., & Kurnianto, S. 2012. Mengungkapkan Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi*, Tahun XXII, No. 3
- Pajak penghasilan atau PPh untuk Koperasi. <http://www.koperasi.net/2009/02/pajak-penghasilan-atau-pph.html> download 8 November 2014
- Pembiayaan Syariah Jadi Perhatian Pemerintah. *Media Keuangan*, Vol. IX (83), Juli 2014
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 35.2/PER/M.UKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Perpajakan Koperasi *Koperasi* www.pajak.go.id/content/seri-koperasi-perpajakan-bagi-koperasi download 8 November 2014
- Pratiwi, A.A., Sondakh, J.J., & Kalangi, L. 2014. Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT Nichindo Mando Suisan. *Jurnal EMBA*, Vol. 2 (3): 254-265, September

Rudianto. 2008. *Akuntansi Koperasi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. PT Grasindo, Jakarta.

Rudiantoro, R & Siregar, S.V. 2012. Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9 (1): 1-21

Undang-Undang No 17 tahun 2012 tentang Pengkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212)